



HAMID PRIOEGI, S.H.

**NOTARIS / PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
KOTA BAUBAU**

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia
Nomor C-173/HT.03.01-Th.1996 Tanggal 23 Mei 1996

Keputusan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 9-XI-1998 Tanggal 4 Juni 1998

YAYASAN SANGIA BARAKATI

Akta Nomor : - 45 -
Tanggal : 15 Mei 2015

= TURUNAN =

YAYASAN SANGIA BARAKATI

Nomor : - 45 -

— Pada hari ini, J u a t a, tanggal (15) lima belas bulan Mei tahun (2015) —

dua ribu lima belas, pukul (11.30) sebatas lebih tiga puluh menit Waktu —

Indonesia Tengah, menghadap kepada saya, —

HAMID PRIOEGI, Sarjana Hukum —

Notaris bertempat kedudukan di Kota Baubau —

dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada bagian akhir akta ini dan —

yang telah dikenal oleh saya, notaris. —

— **Nyonya Hajjah MAALIA, Sarjana Pendidikan**, lahir di Kambara-Muris, —

pada tanggal (11) tiga puluh satu bulan Desember tahun (1962) seribu sembilan ratus —

enam puluh dua, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal —

di Kabupaten Muna, Kecamatan Tawiro Kepulauan, Kelurahan Tawiro, Nomor Induk —

Kependudukan (NIK) 7403037112520008, sementara ini sedang berada di Baubau; —

— Penghadap dikenal oleh saya, notaris. —

— Penghadap dalam kedudukan sebagaimana tertera di atas menerangkan —

selaku dengan telah mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang —

berlaku serta dengan ini dari pihak yang berwenang, penghadap sepakat dan setuju —

untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut : —

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Paraf : —

(1) Yayasan ini bernama : —

YAYASAN SANGIA BARAKATI

selengkapnya dalam anggaran dasar ini cukup diangkat dengan Yayasan, —

berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Muna Barat —

(2) Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam —

maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan —

persetujuan Pembina. —

MAKSUD DAN TUJUAN

Paraf : 2 —



— Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang Sosial, Keagamaan dan Kemasyarakatan.

KEGIATAN

Pasal 3

— Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

a. Di Bidang Sosial :

a. Lembaga Pendidikan Formal dan Non Formal.

b. Partisipasi, Partisipasi, dan Partisipasi.

c. Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium.

d. Pembinaan Olah Raga.

e. Penelitian bidang Ilmu Pengetahuan.

f. Studi Banding.

b. Di Bidang Kemasyarakatan.

a. Memberi bantuan kepada korban bencana alam.

b. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang.

c. Memberikan bantuan kepada tuna Wicara, tuli, buta, dan gelandangan.

d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan rumah duka.

e. Memberikan perlindungan konsumen.

f. Menstabilkan lingkungan hidup.

c. Di Bidang Keagamaan.

a. Mendirikan sarana ibadah.

b. Menyelenggarakan Pesantren.

c. Meningkatkan pemahaman keagamaan.

d. Melaksanakan syiar keagamaan.

e. Studi Banding Keagamaan.

JANGKA WAKTU

Pasal 4

— Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

- (1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari Kekayaan Perdiri _____
yang disalurkan, terdiri dari (Rp1.000.000.000,-) seratus juta rupiah. _____
- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kekayaan Yayasan dapat _____
juga diperoleh dari : _____
- a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; _____
- b. wakaf; _____
- c. hibah; _____
- d. tidak wasiat; _____
dan _____
- e. perolehan yang lain yang tidak berbentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan _____
dari atau pursuant perundang-undangan yang berlaku. _____
- (3) Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan _____
Yayasan. _____

ORGAN YAYASAN

Paragraf 5

- Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : _____
- a. Pembina; _____
- b. Pengurus; _____
- c. Pengawas. _____

PEMBINA

Paragraf 7

- (1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diberikan _____
kepada Pengurus atau Pengawas. _____
- (2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina. _____
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang di antaranya _____
diangkat sebagai Ketua Pembina. _____
- (4) Yang dapat diangkat anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai _____
Perdiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota _____
Pembina telah mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud _____
dan tujuan Yayasan. _____

- (5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan. _____
- (6) Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, _____
maka dalam waktu (30) tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib _____
diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota _____
Pengawas dan anggota Pengurus. _____
- (7) Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan _____
memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling _____
lambat (30) tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. _____

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. _____
- (2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina _____
tersebut : _____
a. meninggal dunia; _____
b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam _____
Pasal 7 ayat (7); _____
c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku; _____
d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; _____
e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu _____
penetapan pengadilan; _____
f. dilarang untuk menjabat anggota Pembina karena peraturan perundang- _____
undangan yang berlaku; _____

- (3) Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau _____
anggota Pengawas. _____

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

- (1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. _____
- (2) Kewenangan Pembina meliputi : _____
a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar; _____
b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas; _____
c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan; _____

- d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan
- e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan;
- f. pengesahan laporan tahunan;
- g. penunjukan auditor dalam hal Yayasan dibubarkan.

- (3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka anggota tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina berlaku pula begini.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

- (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam (1) satu tahun, paling lambat dalam waktu (5) lima bulan setelah akhir tahun buku. Urutan rapat tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atau permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau anggota Pengawas.
- (2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak dinyatakan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan semua mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat pembina dipimpin oleh ketua pembina dan jika Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka rapat pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

- (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Dihadiri paling sedikit $(2/3)$ dua per tiga dari jumlah anggota Pembina;
 - b. Dalam forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat (10) sepuluh hari dan paling lambat (21) dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama;
 - e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $(1/3)$ satu per dua jumlah anggota Pembina.
- (2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $(1/2)$ satu per dua jumlah suara yang sah.
- (4) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak memengaruhi (1) satu suara dan tambahan (1) satu suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Rapat Pembina menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. Suara yang absen dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris Rapat.

- (7) Penetapan mengenai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat dilakukan apabila
Denda Acara Rapat dibuat dengan Akta Notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina,
dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan
semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan
secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan
yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.
- (10) Dalam hal hanya ada (1) satu orang pembina, maka dia dapat mengambil
keputusan yang sah dan mengikat.

RAPAT TAHUNAN

Pasal 12

- (1) Pembina wajib menyelenggarakan Rapat Tahunan setiap tahun, paling lambat
(5) lima bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.
- (2) Dalam Rapat Tahunan Pembina melakukan :
- evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban yayasan tahun yang
lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perbaikan mengenai perkembangan
yayasan untuk tahun yang akan datang;
 - pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan pengurus;
 - penetapan kebijakan umum yayasan;
 - pengesahan program kerja dan anggaran anggaran tahunan yayasan.
- (3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
Para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan
yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejak tindakan tersebut
terdapat dalam Laporan Tahunan.

PENGURUS

Pasal 13

- (1) Pengurus adalah organ yang melaksanakan kepemimpinan yayasan yang seluruhnya
terdiri dari :

- a. Seorang Ketua ; _____
b. Seorang Sekretaris ; dan _____
c. Seorang Bendahara. _____

- (2) Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Ketua, maka (1) satu orang _____
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum. _____
(3) Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang sekretaris, maka (1) satu orang _____
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum. _____
(4) Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Bendahara, maka (1) satu orang _____
diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum. _____

Pasal 14

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan _____
yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam _____
melakukan pengurusan yayasan yang menyebabkan kerugian bagi yayasan, _____
masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu _____
(5) lima tahun, terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. _____
(2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu _____
(5) lima tahun dan dapat diangkat kembali. _____
(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus yayasan : _____
a. bukan pendiri yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina dan _____
Pengawas; dan _____
b. melaksanakan kepemimpinan yayasan secara langsung dan penuh. _____
(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama (30) _____
tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan _____
rapat, untuk mengisi kekosongan itu. _____
(5) Dalam hal semua jabatan, Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling _____
lama (30) tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, pembina harus _____
menyelenggarakan Rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara _____
Yayasan diurus oleh Pengawas. _____
(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan _____
secara tertulis mengenai indikasinya tersebut kepada Pembina, paling lambat _____

(30) tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

(7) Diakui hal tersebut penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu

(30) tiga puluh hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian pengurus

Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pembatalan secara tertulis kepada

Memori Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(8) Pengurus tidak dapat menyangkal sebagai Pembina, Pengawas atau pelaksana

kegiatan.

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila :

(1) Meninggal dunia;

(2) Mengundurkan diri;

(3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diaman

dengan hukuman penjara paling sedikit (5) lima tahun;

(4) Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;

(5) Masa jabatannya berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan

Yayasan.

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan

yayasan untuk disahkan Pembina.

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan

oleh Pengawas.

(4) Setiap anggota pengurus wajib dengan etika baik dan penuh tanggung jawab

melaksanakan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

(5) Pengurus berhak mewakili yayasan didalam dan diluar pengadilan tentang segala

hal dan dalam segala kejadian dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan tidak termasuk

mengambil uang Yayasan di Bank.

e. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyerahan dalam berbagai

berbentuk usaha baik di dalam maupun diluar negeri;

f. memberi atau menerima pengalihan atau harta tetap ;

g. membeli atau dengan cara lain mendapatkan / memperoleh harta tetap atau

nama Yayasan;

h. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta

mengajukan / membuat kekayaan Yayasan;

i. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan,

Pembina, Pengurus dan / atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang

bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya

maksud dan tujuan Yayasan.

(6) Pembuatan Pengurus sebagaimana tersebut diatur dalam ayat (5) huruf

a, b, c, d, e, dan f harus mendapat persetujuan dan Pembina.

Pasal 17

— Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal : —

(1) mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;

(2) membelanjakan kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

(3) mengadakan perjanjian dengan organisasi yang akan terafiliasi dengan Yayasan,

Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada

Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya

maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18

(1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya

berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan;

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga,

hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua

lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum

tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu

dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan

seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus

serta mewakili Yayasan.

- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
- (4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
- (5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
- (6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
- (7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 12

- (1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.
- (2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan paksi atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu (5) lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
- (3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka waktu (24) dua puluh empat bulan dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
- (5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus berbenturan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak diperkenankan bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Paragraf 21

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan menandatangani tanda terima, paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Paragraf 22

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. diadun paling sedikit (2/3) dua per tiga jumlah Pengurus. _____
b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak terpenuhi, _____
| maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua. _____
c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4), huruf b, harus _____
| dilakukan paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan _____
| tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. _____
d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat (10) sepuluh hari dan _____
| paling lambat (21) dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama. _____
e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat _____
| apabila dihadiri lebih dari (1/3) satu per dua jumlah Pengurus. _____

Pasal 23

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____
(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka _____
| keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari (1/3) satu per dua jumlah _____
| suara yang sah. _____
(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak. _____
(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup _____
| tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain _____
| dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada _____
| keberatan dari yang hadir. _____
(5) Suara absten dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah _____
| suara yang dikeluarkan. _____
(6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua _____
| rapat dan (1) satu orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat _____
| sebagai Sekretaris Rapat. _____
(7) Perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita _____
| Acara Rapat dibuat dengan akta notaris. _____
(8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan _____
| Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diketahui _____
| secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai _____

usul yang diajukan secara tertulis serta merendatangkan persetujuan tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Parat 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
- (2) Pengawas terdiri dari (1) satu orang atau lebih anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari (1) satu orang Pengawas, maka (1) satu orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Parat 25

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perorangan

yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu (5) lima tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu

(5) lima tahun dan dapat diangkat kembali.

- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama

(30) tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan itu.

- (4) Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling

lama (30) tiga puluh hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus.

- (5) Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan

secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat (30) tiga puluh hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

- (6) Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu

- (7) Dalam jangka waktu (7) tujuh hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina Wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk open kesempatan membela diri.
- (8) Dalam jangka waktu (7) tujuh hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan keputusan Rapat Pembina wajib :
- a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau
 - b. memberhentikan anggota Pengurus yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali jabatannya semula.
- (10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

- (1) Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau Pembina.
- (2) Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak mewakili Pengawas.
- (3) Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawal secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (5) Rapat Pengawas diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.
- (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 29

- (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang

paling lambat (30) tiga puluh hari terhitung sejak tanggal disikukan penggantian
Pengawas Yayasan, Pembina wajib menyampaikan pembentahan secara tertulis
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.

(7) Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pemisra, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan

Pasal 25

Jabatan Pengawas berakhir apabila :

- (1) Meninggal dunia;
- (2) Mengundurkan diri;
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit (5) lima tahun;
- (4) Dibentahkan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
- (5) Masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

- (1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan.
- (2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
- (3) Pengawas berwenang :
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. memeriksa dokumen;
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkan dengan uang kas; atau
 - d. memberi peringatan kepada Pengurus.
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara (1) satu orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
- (6) Dalam jangka waktu (7) tujuh hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.

hadir.

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.

(4) Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :

- a. dihadiri paling sedikit $(2/3)$ dua per tiga dari jumlah Pengawas.
- b. dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat (10) sepuluh hari dan paling lambat (21) dua puluh satu hari dan dihitung sejak Rapat Pengawas pertama.
- e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $(1/2)$ satu per dua jumlah suara yang sah.

Pasal 30

- (1) Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $(1/2)$ satu per dua jumlah suara yang sah.
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Rapat Pengawas menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara abstrain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan (1) satu orang anggota Pengawas lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai

sekretaris rapat.

- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dinyatakan apabila Benda Acara

Rapat dibuat dengan akta notaris.

- (8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara
tertulis dengan mendandatangani usul tersebut.

- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai

kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam
Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

- (1) Rapat gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk

mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

- (2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat (30) tiga puluh hari terhitung sejak Yayasan

tidak lagi mempunyai Pembina.

- (3) Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

- (4) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus Pengawas secara

langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat (7) tujuh
hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan
tanggal rapat.

- (5) Panggilan Rapat gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan agenda

rapat.

- (6) Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan

Yayasan.

- (7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

- (8) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir,

maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh
dan dan Pengurus dan Pengawas yang hadir.

Pasal 32

- (1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
- (3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan (1) satu suara dan tambahan (1) satu suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
- (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
- (5) Suara absten dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

- (1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang menyangkut apabila dihadiri paling sedikit (2/3) dua per tiga dari jumlah anggota Pengurus dan (2/3) dua per tiga dari jumlah anggota Pengawas.
- b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat (7) tujuh hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat (10) sepuluh hari dan paling lambat (21) dua puluh satu hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit (1/3) satu per dua dari jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan

muyawarah untuk mulakat.

- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan muyawarah untuk mulakat tidak tercapai,

maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara
setuju paling sedikit (2/3) dua per tiga bagian dari jumlah suara yang sah
yang dikeluarkan dalam rapat.

- (4) Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk pengesahannya

dilandatangani oleh Ketua rapat dan (1) satu orang anggota Pengurus atau anggota
Pengawas yang diunjuk oleh rapat.

- (5) Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah

terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang
terjadi dalam rapat.

- (6) Pendirian anggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diwajibkan apabila

Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.

- (7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan

yang sah tanpa mengadakan Rapat gabungan, dengan ketentuan semua

Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua

Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul

yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.

- (8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7)

memiliki kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan cara
Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Paragraf 34

- (1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal (1) satu Januari sampai dengan tanggal

(31) tiga puluh satu Desember.

- (2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.

LAPORAN TAHUNAN

Paragraf 35

- (1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat (3) tiga bulan

setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya : _____

a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; _____

b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan. _____

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas. _____

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyubstitusikan alasan tertulis. _____

(5) Laporan tahunan diadukan oleh Pembina dalam rapat Tahunan. _____

(6) Bkhsdr Laporan Tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. _____

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

(1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit (2/3) dua per tiga dari jumlah Pembina. _____

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. _____

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit (2/3) dua per tiga dari sejumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

(4) Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan Rapat Pembina yang kedua paling cepat (3) tiga hari setelah sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama. _____

(5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh (75) satu per dua dari seluruh Pembina. _____

(6) Keputusan Rapat Pembina sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. _____

Pasal 37

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. _____

- (2) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.
- (3) Perubahan anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.

PENGGABUNGAN

Pasal 38

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan (1) satu atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bukar.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :
- a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung ke dalamnya secara atau
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, kebertahanan umum dan keselamatan.
- (2) Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.

Pasal 39

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit (¼) tiga per empat dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit (¼) tiga per empat dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.
- (2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang

akan menerima penggabungan menyusun usul rencana penggabungan.

(3) Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan

dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dan Yayasan yang akan
menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-
masing yayasan.

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) empat dituangkan dalam akta
penggabungan yang dibuat dihadapan notaris dalam Bahasa Indonesia.

(6) Pengurus yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat (30) tiga puluh hari
sejak penggabungan selesai dilakukan.

(7) Dalam hal penggabungan yayasan diikuti dengan perubahan anggaran dasar

yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

maka akta perubahan Anggaran Dasar yayasan wajib disampaikan kepada

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan
diampai akta penggabungan.

PEMBUBARAN

Pasal 40

(1) Yayasan bubar karena :

a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam
Anggaran Dasar berakhir;

b. tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak
tercapai;

c. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan :

1) Yayasan melanggar ketentuan umum dan khususnya;

2) Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pelit; atau

3) Harta kekayaan yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya setelah
pernyataan pelit diputus.

(2) Dalam hal yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,

Pembina menunjuk liquidator untuk membereskan kekayaan yayasan.

Pembubaran yayasan dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat

Pembina yang hadir paling sedikit (¼) tiga per empat dan jumlah anggota Pembina dan pengurus paling sedikit (¼) tiga per empat dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator

Pasal 41

(1) Dalam hal yayasan bubar, yayasan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.

(2) Dalam yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama yayasan.

(3) Dalam hal yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.

(4) Dalam hal pembubaran yayasan karena paksa, berlaku peraturan perundang-undangan bidang kepailitan.

(5) Ketentuan mengenai persurukan, pengangkutan, pemberhentian sementara, pemberhentian, sewa-menyewa, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.

(6) Likuidator atau kurator yang ditunjuk untuk melakukan penbersihan kekayaan yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat (5) lima hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(7) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat (30) tiga puluh hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

(8) Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat (7) tujuh hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran yayasan kepada Pembina.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI

Pasal 42

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang mempunyai

maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan yang tular,

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan

kepada Badan Hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan yayasan yang tular, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-Undang yang berlaku bagi Badan Hukum tersebut.

(3) Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan yayasan lain atau kepada

Badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan yang tular.

Pasal 43

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pemda.

(2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan aturan sebagai berikut :

a. Pembina :

- Penghastip **Nyonya Hajjah MAALIA**, Sarjana Pendidikan,

b. Pengawas :

- **Tuan Haji LA ODE ANSI**, Sarjana Pendidikan, lahir di Buton pada

tanggal (31) tiga puluh satu bulan Desember tahun (1961) sembu sembilang

ratus enam puluh satu, Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil,

bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Kecamatan Tiworo Kepulauan,

Kelurahan Tiworo, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403033112610011,

- **Tuan AMIN APULU**, lahir di Buton pada tanggal (31) tiga puluh satu

bulan Desember tahun (1955) sembu sembilang ratus lima puluh lima,

Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal

di Kota Sumbawa, Kecamatan Murhum, Kelurahan Lento, Jalan La Ode Sulis

nomor 24, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7472063112550005,

c. Pengurus :

Ketua

Tuan LA ODE MUHAMAD NUZUL ANSI, lahir di Kambora

pada tanggal (26) enam belas bulan Mei tahun (1987)

seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh, Warga Negara

Indonesia, Winiwasta, bertempat tinggal di Apusam

Muna, Kecamatan Tawiro Kepulauan, Kelurahan Tawiro,

Nomor Induk Kependudukan (NIK) 7403021605670001;

Sekretaris

Nona SUARNI, lahir di Baubau pada tanggal (8) delapan

bulan November tahun (1998) seribu sembilan ratus

delapan puluh delapan, Warga Negara Indonesia,

Winiwasta, bertempat tinggal di Kota Baubau,

Kecamatan Batupora, Kelurahan Lento, Jalan La Ode Sona

nomor 24, Nomor Induk Kependudukan (NIK)

7472064811080002;

Bendahara

Nona SITI AYSAN ANSI, lahir di Kambora pada tanggal

(12) dua belas bulan April tahun (1990) seribu sembilan

ratus sembilan puluh, Warga Negara Indonesia, Winiwasta,

bertempat tinggal di Kabupaten Muna, Kecamatan Tawiro

Kepulauan, Kelurahan Tawiro, Nomor Induk Kependudukan

(NIK) 7403025204900201;

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan anggota

Pengawas Yayasan telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan

dan harus diakhiri dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta

Pendirian ini mendapat pengesahan atau dicatatkan pada instansi yang berwenang

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memediasi

kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan

dan atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang

dan untuk membuat pengubahan dan atau tambahan dalam bentuk yang

bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut.

dan untuk mengesahkan serta menandatangani semua permohonan dan dokumen
lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan
lain yang mungkin diperlukan.

DEMikian

akta ini dibuat dan direvisikan di Baubau, pada hari ini dan tanggal sebagaimana tertulis
pada awal akta ini dengan dihadiri saksi-saksi :

- Nyonya ERNA WATT, lahir di Baubau pada tanggal (14) empat belas bulan

Mai tahun (1977) seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh, pegawai kantor notaris,

bertempat tinggal di Kota Baubau, Kecamatan Wolo, Kelurahan Tomba,

jalan Muhammad Husein Thomin nomor 24.

dan

- Tuan YAYAN SAPUTRA, lahir di Baubau pada tanggal (13) tiga belas bulan Januari

tahun (1993) seribu sembilan ratus delapan puluh enam, pegawai kantor notaris,

bertempat tinggal di Kota Baubau, Kecamatan Wolo, Kelurahan Tomba,

jalan Jendral Sudirman.

— Segara setelah akta ini saya, notaris bacakan kepada para penghadap dan

para saksi, lalu akta ini ditanda tangani oleh mereka masing-masing dan

berturut-turut dan saya, notaris.

— Disaksikan dengan saksi penambah, saksi pencoretan,

dan saksi penggantian.

— Maka akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

— DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007458.AH.01.04.Tahun 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SANGIA BARAKATI
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HAMID PRIODEGI, SH sesuai Akta Nomor 45 Tanggal 15 Mei 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SANGIA BARAKATI tanggal 19 Mei 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5013051974100829 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SANGIA BARAKATI;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

1. Memberikan pengesahan badan hukum YAYASAN SANGIA BARAKATI berkedudukan di KABUPATEN MUNA BARAT sesuai Akta Nomor 45 Tanggal 15 Mei 2015 yang dibuat oleh Notaris HAMID PRIODEGI, SH berkedudukan di KOTA SAU BALI.

KEDUA

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
PL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**DR. AIDER AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 25 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007458.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 Mei 2015



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0007458.AH.01.04.Tahun 2015

TENTANG
PENGESEAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN SANGIA BARAKATI

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

1. Kekayaan awal: Rp. 100.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
Hajjah MAALIA, S.Pd.	7403037112620006

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
Hajjah MAALIA, S.Pd.	7403037112620006	PEMBINA	KETUA
LA ODE MUHAMAD NUZUL ANSI	7403031605870001	PENGURUS	KETUA UMUM
SUARNI	7472064811880002	PENGURUS	SEKRETARIS
SITI AYSAH ANSI	7403035204900201	PENGURUS	BENDAHARA
H. LA ODE ANSI, S.Pd.	7403033112610011	PENGAWAS	KETUA
AMIN APOLU	7472063112550005	PENGAWAS	ANGGOTA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 25 Mei 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

PL DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



DR. AIDIR AMIN DAUD, S.H., M.H.
NIP. 19581120 198810 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 25 Mei 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007458.AH.01.12.Tahun 2015 TANGGAL 25 Mei 2015



**PEMERINTAH KABUPATEN MUNA BARAT
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Kompleks Perkantoran Bumi Praja Laworo. E-Mail: bkpmdolap.mubarat@yahoo.com

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 503 / 421.3.5 / 090 / VI/2015**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN SWASTA (SMKS) KESEHATAN MUNA BARAT
DESA WAPAE KECAMATAN TIWORO TENGAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

**KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUNA BARAT**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di wilayah daerah pemekaran khususnya Kabupaten Muna Barat dan untuk mendekatkan pelayanan pendidikan guna pembentukan karakter peserta didik tingkat sekolah menengah serta memperluas daya tampung siswa pada SMK Swasta Kesehatan Muna Barat maka perlu diberikan Izin Operasional pada sekolah dimaksud.
- b. bahwa berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Nomor 429/463/2015 tanggal 15 Juni 2015 SMK Swasta Kesehatan Muna Barat dianggap layak untuk beroperasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Bupati Muna Barat melalui Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Baru;
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 188/636/Kep/429/012/2004 tentang Pembentukan Tim Penilai Pendirian Sekolah Baru Negeri / Swasta;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
14. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat;
15. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 137 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;
16. Peraturan Bupati Muna Barat Nomor 161 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Muna Barat tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat;

Memperhatikan : Permohonan Ketua Yayasan Sangia Barakati Nomor 006/YSB/SMKS-Kes/VI/2015 tentang Izin Operasional SMKS Kesehatan Muna Barat tanggal 15 Juni 2015.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan persetujuan Izin Operasional kepada Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kesehatan Muna Barat di Desa Wapae Kecamatan Tiworo Tengah Kabupaten Muna Barat terhitung mulai Tahun Ajaran 2015 / 2016;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berlangsungnya kegiatan Sekolah Menengah Kejuruan Swasta (SMKS) Kesehatan Muna Barat menjadi tanggung jawab Penyelenggara dan atau Yayasan Sangia Barakati;
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Penyelenggara berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah yang dibinanya secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab. Muna Barat;
- KELIMA : Apabila diktum ke 1 sampai dengan ke 4 tidak dapat dipenuhi maka Bupati Muna Barat melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Muna Barat dapat mencabut keputusan ini;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : LAWORO

PADA TANGGAL : 19 JUNI 2015

An. Pj. BUPATI MUNA BARAT

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAERAH

DAK PRIZMAN TERPADU SATU PINTU,



HASIDWIN MAANESH

Pembina Tk. I, Gol. IV/b

NIP. 195812061993031004

Tembusan di sampaikan kepada yang terhormat :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta.
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari.
3. Bupati Muna Barat di Laworo (sebagai laporan).
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sultra di Kendari.
5. Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kab. Muna Barat di Laworo.
6. Camat Tiworo Tengah di Wapae
7. Yayasan Sangia Barakati di Kambara
8. Arsip